



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebebasan Pers Afrika Selatan (1994-1999) dan
Indonesia (1998-1999): Studi Komparatif**

Skripsi
Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Virginia Meichita Saputra

2017330010

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebebasan Pers Afrika Selatan (1994-1999) dan
Indonesia (1998-1999): Studi Komparatif**

SKRIPSI

Oleh:

Virginia Meichita Saputra
2017330010

Pembimbing:

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Sarjana Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Virginia Meichita Saputra
Nomor Pokok : 2017330010
Judul : Kebebasan Pers Afrika Selatan (1994-1999) dan Indonesia (1998-1999): Studi Komparatif

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 20 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

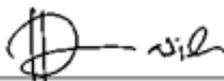
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA

: 

Anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Virginia Meichita Saputra

NPM : 2017330010

Jurusan : Hubungan Internasional

Judul : Kebebasan Pers Afrika Selatan (1994-1999) dan
Indonesia (1998-1999): Studi Komparatif

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri, bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Karya tulis ilmiah ini berisikan pendapat dari pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab penuh, dan saya bersedia untuk menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 28 Desember 2020



Virginia Meichita Saputra

2017330010

ABSTRAK

Nama : Virginia Meichita Saputra
NPM : 2017330010
Judul : Kebebasan Pers Afrika Selatan (1994-1999) dan
Indonesia (1998-1999): Studi Komparatif

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat bahkan berekspresi untuk masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun sayangnya di dalam beberapa negara demokrasi, kebebasan pers justru terhalang oleh adanya kebijakan atau undang-undang yang mengatur, bahkan kebebasan pers ditunggangi oleh kepentingan individu atau partai politik. Afrika Selatan dan Indonesia merupakan dua negara demokrasi yang belum merasakan kebebasan pers sepenuhnya. Kedua negara tersebut masih terhalang dengan adanya sistem pers yang otoriter pada masa Apartheid dan masa Orde Baru, sehingga kebebasan pers masih sangat terhambat. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana Upaya Pemerintah Afrika Selatan dan Indonesia dalam memperjuangkan Kebebasan Pers?”** Untuk mempermudah pemahaman, dan menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menganalisis menggunakan konsep studi komparatif, dengan salah satu metode analisisnya yaitu most similar system design yaitu dengan menganalisis persamaan antara kasus-kasus yang serupa.

Dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan dan Indonesia dalam memperjuangkan pers cukup beragam. Bergabungnya pemerintah Afrika Selatan dengan partai politik, pembuatan aturan-aturan mengenai pers oleh pemerintah Indonesia, hingga pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang membebaskan pers. Pada saat Nelson Mandela dan BJ Habibie menjabat pun, kebijakan yang dibuat membuka peluang masyarakat untuk berekspresi melalui media massa/pers. Tetapi, kemerdekaan pers tidak sepenuhnya bebas atau merdeka. Bergulirnya waktu, pers terus mengalami banyak penyempurnaan, dan juga semakin banyak organisasi pemerintahan, semakin banyak juga institusi yang menunggangi pers dengan tujuan politik.

Kata kunci: Kebebasan Pers, Demokrasi, Afrika Selatan, Indonesia, Studi Komparatif, Most similar system design.

ABSTRACT

Name : Virginia Meichita Saputra
NPM : 2017330010
Title : Press Freedom of South Africa on 1994-1999 and Indonesia
1998-1999: Comparative Study

*Press freedom is one of the pillars of a democratic country. In a democratic country, freedom of opinion and even expression for society is highly respected. Unfortunately, in some democratic countries, freedom of the press is hindered by the existence of policies or laws that regulate, even the freedom of the press is ridden by the interests of individuals or political parties. South Africa and Indonesia are two democracies that have not experienced full press freedom. An authoritarian press system still hampered the two countries during the Apartheid and New Order periods, so press freedom was still severely hampered. Departing from this, this study seeks to answer the research question: "**How are the South African and Indonesian governments' efforts in fighting for Press Freedom?**" To make it easier to understand and answer the research questions, the authors analyzed using comparative studies, with one of the analytical methods, namely the most similar system design, namely by analyzing the similarities between similar cases.*

It can conclude that the efforts made by the South African and Indonesian governments in fighting for the press are quite diverse. The joining of South African governments with political parties, the making of regulations regarding the press by the Indonesian government, finally resulted in a policy that freed the press. Even when Nelson Mandela and BJ Habibie took office, the policies created opened up opportunities for the public to express themselves through the mass media/press. However, freedom of the press is not completely free or independent. As time goes by, the press continues to experience many improvements, and also the more government organizations, the more institutions ride on the press with political aims.

Keywords: Freedom of Press, Democracies, South Africa, Indonesia, Comparative Studies, Most Similar System Design.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, oleh izin dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktu-Nya. Ketertarikan penulis membawakan topik pers ke dalam penulisan skripsi ini dipersembahkan untuk perkembangan ilmu HI terutama kelompok bidang ilmu empat, terkait media, jurnalisme dan masyarakat transnasional. Dengan menggunakan studi komparasi, most similar system design, besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik sebagai pelengkap maupun pengisian kekosongan dari penelitian yang sudah ada. Dari judul penelitian yaitu Analisa Kebebasan Pers di Afrika Selatan dan Indonesia menggunakan studi komparatif diharapkan pembaca dapat memahami historis pers dengan banyak kasus serupa, juga perjuangan pemerintah dalam membuat kebijakan, dari era Orde Baru dan Apartheid, hingga era Reformasi dan Non-Apartheid. Pun terdapat hal menarik yang penulis bahas seperti psikologi politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan kala itu.

Dengan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mba Ratih Indraswari, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan waktu, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi ini, hingga selesainya skripsi ini, semua karena bimbingan beliau. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan dan kekuatan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam penulisan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Terima kasih.

Virginia Meichita Saputra

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan, pada waktu-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Puji dan Syukur yang tidak habisnya saya panjatkan untuk anugrah dan penyertaannya setiap waktu. Bersyukur juga untuk banyak pihak yang mendukung dan hadir dalam setiap perjalanan penelitian ini. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada;

Teruntuk, *Papa, Mama, Vea, Vael, Opah, Ema, dan Engkong*, juga seluruh keluarga besar saya. Terima kasih, untuk kesempatan dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya, untuk kasih-sayang, dan pengertiannya. Terima kasih banyak.

Teruntuk, *Mbak Ratih Indraswari*, dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak Mbak! Untuk waktu, bimbingan dan pembelajarannya. Terima kasih selalu mengingatkan saya untuk percaya diri. Terima kasih untuk *pressure* yang mendorong saya untuk mengerjakan skripsi ini. Selamat menempuh pendidikan lagi Mbak di negeri ginseng. It's a pleasure to know you, Mbak! See you again soon.

Teruntuk, *Anselm Bram*, my forever 911. Thank you, so much, for being part of my 3,5 years journey and so on (hope so). Thank you for always being there and offering your shoulder when I needed one. Thank you for helping, listening, supporting, and encouraging me through all those tough times. You are a blessing to me. I am forever grateful. Thank you.

Teruntuk, *Tasha*. Terima kasih untuk 3,5 tahun yang ga pernah abis untuk selalu nemenin gue gabut, nemenin nugas, galau, sakit, nemenin makan malem-malem, gue telfon random ngajak cabut, bahkan ngeliatin phobia lu sama kupu-kupu. Thank you selalu dating ke kosan gue apapun keadaan lo sha. Semoga cita-cita dan harapan caur kita kedepannya terjadi ya. love you.

Teruntuk, *Tiravy*. My go to jalan-jalan buddy. Tir, thank you ya selalu bikin anak-anak ketawa dengan kekonyolan lo waktu kecil, maen aer cipak-cipak. Thank you juga selalu jadi travel buddy gue. Sesimpel ke pvj doang, tapi bisa ke oz bareng juga. Semoga bisa ke oz lagi ya soon!! Inget, nikah cuma sekali, pikirin lagi! HAHA love you.

Teruntuk, *ApinerZ*. Cowo satu-satunya yang sangat-sangat bisa diandalkan. Setiap uts-uas, kita selalu ngumpul, tapi sampe jam 2 subuh masih ngegossip, dan berujung lo yang bertahan sampe pagi dan ngga tidur, dan paginya kita diajarin lo kalo ga di ppag lt.2 yaa di tamsip. Thank you ya pin, semoga kita bisa jalan-jalan keliling semua coffeeshop dan makanan-makanan bandung!!

Teruntuk, *Nana*. Temen nginep tiap hariiii di kosan, mulai dari rambut kuning, pink, putih sampe sekarang item lagi. Mulai dari mantan ke mantan sampai sekarang jomblo abadi, selamat ya cintaaa sudah selesai. Gue tau lo ga akan bingung mau kerja dimana, karena menurut gue lo cukup jaga nama baik perusahaan jengkol keluarga!! HAHAHA love u!

Teruntuk, *Odie*. Cowi aku suka ganggu kamu dan nanya-nanya mulu, tanpa lo gue buta banget ngurus perskripsian iniii. Thank you selalu ngajarin banyak hal yang gapernah gue sadar, padahal gue tau seharusnya gimana. Ayok camping lagiiii! <3

Teruntuk, *Delegasi Dora ku. Alya, Stella, Kezfeb, Zizi, Jeruth, Tasha, Tira dan Alvin*. Terima kasih telah mengisi waktu-waktu gabut dan panik, capek, kesel, dan ngantuk yang bercampur aduk antara prakdip dan skripsi! Selamat sarjana S.Pain! Look! We did it, prakdip x skripsi! I'll be forever thankful for you guys.

Salam hangat,

Virginia Meichita Saputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR AKRONIM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Teori	17
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.7 Teknik Pengumpulan Data	24
1.8 Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II HISTORI KEBEBASAN PERS AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA	26
2.1 Histori Kebebasan Pers di Afrika Selatan	26
2.1.1 Upaya Pemerintah	27
2.1.1.1 ANC (<i>African National Congress</i>).....	28
2.1.1.2 PAC (<i>Pan Africanist Congress</i>).....	31
2.1.1.3 Konstitusi Tahun 1996	32
2.1.2 Prospek Kebebasan Pers Afrika Selatan	34
2.2 Histori Kebebasan Pers di Indonesia	34
2.2.1 Upaya Pemerintah	38
2.2.1.1 Penerbitan SIT dan SIC	39
2.2.1.2 Penerbitan SIUPP	41
2.2.1.3 UU No. 40 Pasal 2 Tahun 1999	42
2.2.2 Prospek Kebebasan Pers Indonesia	43
BAB III ANALISA STUDI KOMPARATIF KEBEBASAN PERS AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA	46
3.1 Analisis Studi Komparatif; Most Similar System Design Kebebasan Pers di Afrika Selatan dan Indonesia	46
3.2 Analisis Negara Demokrasi.....	48

3.3 Analisis Transisi Pemerintahan	55
3.4 Analisis Pembredelan Media Massa	58
3.5 Analisis Sistem Otoriter	64
3.6 Analisis <i>Political Behavioral Leader</i>	68
3.7 Analisis Upaya Pemerintah	74
BAB IV KESIMPULAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
Buku	viii
Artikel Jurnal.....	xi
Laporan	xiv
Website	xiv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran	23
Bagan 3. 1 Perbandingan Sistem Pemerintahan Otoriter dan Demokratis	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisa Komparasi Afrika Selatan dan Indonesia	47
Tabel 3. 2 Penyederhanaan Partai Politik Orde Baru	52
Tabel 3. 3 Partai Politik era Apartheid	54
Tabel 3. 4 Pembredelan Media Massa Indonesia dan Afrika Selatan	63

DAFTAR AKRONIM

ABRI	<i>Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</i>
ANC	<i>African National Congress</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
G30S	<i>Gerakan 30 September</i>
GASBINDO	<i>Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia</i>
GOLKAR	<i>Golongan Karya</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
HMI	<i>Himpunan Mahasiswa Islam</i>
IPM	<i>Ikatan Pelajar Muhammadiyah</i>
IPKI	<i>Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia</i>
KOPKAMTIB	<i>Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban</i>
KUH	<i>Kitab Undang-undang Hukum</i>
MALARI	<i>Malapetaka Lima belas Januari</i>
MPRS	<i>Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara</i>
MURBA	<i>Musyawaharah Rakyat Banyak</i>

PAC	<i>Pan Africanist Congress</i>
PARMUSI	<i>Partai Muslimin Indonesia</i>
PARKINDO	<i>Partai Kristen Indonesia</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PERTI	<i>Persatuan Tarbiyah Islamiyah</i>
PEMILU	<i>Pemilihan Umum</i>
PII	<i>Pelajar Islam Indonesia</i>
PKI	<i>Partai Komunis Indonesia</i>
PNI	<i>Partai Nasional Indonesia</i>
PSII	<i>Partai Syarikat Islam Indonesia</i>
PUI	<i>Persatuan Umat Islam</i>
RAPBN	<i>Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</i>
SARA	<i>Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan</i>
SIC	<i>Surat Izin Cetak</i>
SIT	<i>Surat Izin Terbit</i>
SIUPP	<i>Surat Izin Usaha Penerbitan Pers</i>
TAP	<i>Ketetapan</i>
TRC	<i>Truth and Reconciliation Commissio</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hadirnya media massa atau pers di tahun 1920-an, menjadikan pers sebagai wadah komunikasi yang digunakan khusus untuk menyebarkan informasi agar mencapai masyarakat luas. Perlahan, pers mulai digunakan di semua aspek untuk mempermudah pembahasan mengenai pembangunan, ekonomi dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu terhalang dengan Undang-Undang bahkan institusi yang mengatur sehingga membatasi kebebasan yang ada. Kebebasan atau kemerdekaan pers dapat diimplementasikan dengan cara kebebasan dalam memberikan pendapat, berkomunikasi dan berekspresi. Tidak hanya itu, kebebasan juga terdapat di dalam aspek lain, seperti kebebasan berkompetisi atau kebebasan bersaing. Namun sejauh ini, hal itu justru menempatkan media atau pers sebagai kompetisi atas dasar derajat pengaruh kekuasaan. Kebebasan pers mulai dijadikan alat untuk memperkuat kepentingan nasional negaranya sehingga cukup sulit ketika media dijadikan cara untuk mengukur kemajuan pers baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.¹

Setiap negara memiliki kemampuan untuk menyalurkan kebebasan yang dimilikinya. Setiap negara juga beragam, dengan berbagai masalah, isu, dan kepentingan-kepentingannya. Sehingga, kebebasan berekspresi merupakan salah

¹ Prof. Dr. Bagit Manan, SH., MCL. *"Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia"* Jakarta. DEWAN PERS. Januari 2016.

satu upaya untuk melindungi keberagaman, juga menjadi sarana bertukar pikiran antara dua atau lebih negara. Media massa sendiri memiliki sistem pengelolaan, dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi unsur-unsur manajemen yang baik. Seperti, *organizing, financing, operating, controlling*, dan lain-lain. Sistem pengelolaan tersebut merupakan upaya untuk membangun pers professional di mata publik, juga memberikan kepercayaan atau membentuk pandangan masyarakat luas dengan menyalurkan informasi yang akurat, tepat, faktual, terpercaya dan lengkap.²

Kebebasan pers merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dalam satu negara, karena kebebasan pers merupakan salah satu indikator dari demokrasi empirik. Kebebasan pers memiliki peran dan fungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, menghibur, bahkan juga sebagai kontrol sosial. Kebebasan pers memungkinkan sistem politik terdapat di dalamnya, seperti contohnya; komunikasi politik, kritik sosial, yang merupakan beberapa hasil dari kebebasan pers dalam dunia politik. Namun, perlu diketahui bahwa media atau pers diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Idealnya juga, media harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakan nilai-nilai dasar, dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Pers juga harus memiliki hak, hak untuk dikritik, hak kontrol dan hak koreksi, guna menjaga, memantau dan mengontrol agar mendorong kebebasan dan pemerintahan yang bersih.³

² McQuail, Denis. "*Teori komunikasi massa.*" Edisi 6, Buku 1, Salemba Humanika, Jakarta 2011.

³ Muchtar, Adinda T dan Koban, Antonius W. "*Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara: Pers, Buku dan Film.*" Freedom Institute. Jakarta. November, 2010.

Munculnya kekuatan Pers, berasal dari kemampuan untuk memberikan atau menahan publisitas dari kapasitas informatifnya. Perubahan masyarakat industri ke masyarakat informasi merupakan sebuah inovasi dari bidang komunikasi dan teknologi komputer, sehingga memperluas langkah dalam penyebaran informasi dan percepatan arus informasi. Masyarakat juga cenderung ingin memiliki kemampuan menulis dan kemampuan membaca yang lebih baik dari masa lalu. Sehingga, dalam perubahan masyarakat industri ke masyarakat informasi menjadi sebuah tuntutan kemajuan teknologi dan masyarakatnya untuk terus berkembang.

Nyatanya, banyak dari negara di dunia tidak memiliki kebebasan pers yang kuat. Beberapa negara membutuhkan perlindungan dari polisi, terhadap wartawannya yang menjadi korban atas tindakan kejahatan terorganisir. Beberapa jurnalis juga takut dikarenakan adanya retorika kebencian yang merupakan sebuah resiko seorang penulis di seluruh dunia. Di negara-negara Muslim, kebebasan pers juga menjadi tantangan, karena maraknya penistaan agama, bahasan media yang terlalu independen, merupakan tantangan terbesar para jurnalis dan media untuk berhati-hati dalam memberikan berita yang ada.⁴ Kebebasan pers bukan hanya sesuatu yang dijamin oleh hukum atau diberikan oleh penguasa. Justru, para jurnalis dan pekerja media, seharusnya menikmati kebebasan pers di negaranya, agar dapat menjadi acuan atau contoh bagi jurnalis di negara lain. Menjadi seorang jurnalis juga, berarti harus selalu bersedia mempertanyakan keyakinan sendiri, atau bahkan

⁴ Ehl, David. "Reporter Lintas Batas: Kebebasan Pers Global Terancam." <https://www.dw.com/id/reporter-lintas-batas-kebebasan-pers-global-terancam/a-48385628>, 2019. (diakses pada tanggal 1 Februari 2020)

keyakinan kelompok kolega, mempertanyakan fakta-fakta, dan akan ada pandangan baik yang diterima ataupun ditolak oleh kubu lawan.

Banyak dari jurnalis dan penulis mengkhawatirkan kebebasan pers di negaranya akan berakibat pada kemunduran bangsa. Dikhawatirkan juga terjadinya pembodohan atau terkristalisasinya dunia pers, lewat ancaman terhadap isu SARA, tekanan massa, kepentingan bisnis dan suap. Hal ini juga merupakan opini publik dimana, kekecewaan terhadap pers bebas, yang berusaha untuk menjaga rahasia politik, keutuhan, dan kedaulatan negara, dan dalam menyalurkan aspirasi politik untuk memperoleh informasi tanpa melanggar keutuhan hak kebebasan pribadi setiap individu. Dalam menyebarkan atau memperluas informasi kepada masyarakat, kebebasan pers sebaiknya tidak dibatasi, baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan-tindakan kekerasan. Pers memiliki hak untuk memperoleh data, mencari data, hingga menyebarluaskan tanpa adanya gangguan dari pemilik media maupun pemerintah.⁵ Kontribusi pers terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki potensi positif, dalam berkontribusi dengan masyarakat, pemerintah dan pers itu sendiri. Pers sendiri diharapkan memiliki bobot dan tanggung jawab terhadap kebebasan yang ada. Dengan dibatasi oleh kode etik sebagai landasan dan sebagai dasar tanggung jawab untuk melestarikan kemerdekaan pers. Atas dasar tersebut, pers dapat mengeksplorasi bahkan

⁵ Fajar Promono, M. *"Komunikasi Pembangunan dan Media Massa: Suatu Telaah Historis, Paradigmatik dan Prospektif."* Vol.1, No.1, Juni 2016.

mengkritisi pemerintah. Tidak hanya itu, pers juga wajib untuk mentaati kode etik, yaitu kode etik jurnalistik.⁶

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Afrika Selatan dan Indonesia merupakan dua negara berkembang yang terus berjuang untuk memperjuangkan kebebasan pers dari masa ke masa. Perjuangan Afrika Selatan pada era Apartheid dalam memperjuangkan kebebasan persnya juga dirasakan dan dialami oleh Indonesia pada masa Orde Baru. Kedua negara tersebut berjuang untuk mempertahankan pilar-pilar sebagai Negara Demokrasi. Tertutupnya pers di era Apartheid dan Orde Baru tersebut memperlihatkan bahwa peran pers tidak terlaksana sebagaimana mestinya, pers tidak memiliki hak dan kebebasan yang seharusnya dimiliki. Sistem sebuah negara dalam kehidupan persnya pun kala itu serupa, yaitu menjadikan pers sebagai alat kekuasaan pemerintah. Undang-undang yang dibentuk tidak dapat mengatasi kebebasan-kebebasan yang seharusnya dirasakan media atau jurnalis. Hingga tiba waktunya, dimana Nelson Mandela dan BJ. Habibie menjadi presiden, kehidupan awal mula masa penjajahan pers mulai dibenahi. Dari kedua identifikasi masalah diatas, penulis menyimpulkan bahwa Afrika Selatan dan Indonesia pernah satu rasa satu asa dalam melewati masa-masa kelam kehidupan persnya.

Di era tahun 1930-an merupakan masa-masa kelam bagi mereka yang berkulit hitam. Seolah berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang berkulit putih, mereka diperlakukan berbeda dan tidak seharusnya oleh orang berkulit putih.

⁶ Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M, Hum. “*Penegakan Hukum PERS.*” Oktober 2015.

Nelson Rolihlahla Mandela, seorang pemuda Afrika berkulit hitam, yang memperjuangkan hak-haknya sebagai orang kulit hitam di Afrika bahkan di dunia. Mandela menjadi orang berkulit hitam pertama yang menjabat sebagai Presiden pada tahun 1994 hingga 1999, yang bekerja keras untuk mewujudkan transisi dan aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam.⁷

Banyak hal yang terjadi di era apartheid kala itu, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal aktivitas politik, larangan untuk orang-orang berkulit hitam dalam mengikuti kegiatan politik. Diskriminasi sosial, juga perampasan hak atas nama keamanan nasional. Ada pula kekerasan antar etnis, ujaran kebencian, pidato penyebar kebencian yang membuat isu diskriminasi semakin memanas. Kebijakan dalam negeri sendiri begitu berantakan, keadaan keuangan pemerintah yang hampir habis untuk membayar hutang negara, banyak dari orang di Afrika Selatan tidak mendapat suplai aliran listrik, air bersih dan banyak dari anak-anak di Afrika Selatan tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Negara dengan kriminalitas tertinggi. Negara dengan wabah *HIV/AIDS*. Hal ini terjadi karena tidak adanya peran Media, peran PERS sebagai pilar demokrasi. *African National Congress* hanya bergantung pada koran saat itu untuk melaporkan protesnya.⁸ Terkekangnya pers di Afrika Selatan membuat Afrika sulit berinteraksi dengan dunia internasional. Afrika Selatan saat itu tidak terjamin dalam melakukan atau berkegiatan untuk menyampaikan opininya melalui media-media yang ada. Pers

⁷ "Biography of Nelson Mandela." <https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography> (diakses pada tanggal 1 Februari 2020).

⁸ Sampson, Anthony. "Nelson Mandela: The Authorised Biography" HarperCollins, 2011.

yang berkualitas akan menyajikan informasi yang etis, bermoral, intelektual, berkualitas juga menjunjung tinggi kredibilitas medianya.

Sama halnya dengan di Indonesia, memasuki masa Orde Baru, pemerintah mendominasi kebebasan berpendapat masyarakatnya, dengan cara mengatur dan mengendalikan kehidupan pers. Pers kala itu tidak mampu memberikan kritik-kritik sebagai fungsi utama yang diemban pers. Banyak sekali resiko pembredelan dan peringatan jika pers berani mengkritik pemerintahan. Memang saat itu era orde baru lahir dengan suasana krisis ekonomi, dimana masih dibalut oleh kekalutan politik, dan huru-hara sosial. Namun, pemerintah kala itu benar-benar memanfaatkan pers atau media massa. Pers yang dengan jelas mendukung pemerintah orde baru, akan dilindungi dan dibidani oleh militer sebagai kekuatan utama pemerintah orde baru, contohnya adalah harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha yang terus dibiarkan berkembang. Tetapi beberapa media yang tidak memiliki orientasi yang jelas, sementara waktu dilarang terbit. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru membiarkan pers tumbuh dan berkembang sepanjang kritik yang disampaikan tidak mengganggu stabilitas nasional.⁹ Di era ini, media massa menjadi wadah yang menarik untuk dikaji keberadaannya di antara masyarakat atau negara. Melihat dari sisi kultural, kecenderungan negara dalam mengendalikan media massa dan warga masyarakat bersifat totalitarian. Media massa dijadikan alat oleh penguasa negara sebagai sarana pengendalian pikiran warga negara. Menjadi permasalahan juga ketika norma fasisme menyatakan bahwa media massa pada

⁹ M.HUM, DRS. SUWIRTA. "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru." Departemen Pendidikan Sejarah. Artikel tahun 2002. <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pers-dan-kritik-sosial-pada-masa-orde-baru/>

dasarnya merupakan alat untuk kekuasaan, bukan sebagai sarana masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan fakta. Disini, pemerintahan akan menguasai alam pikiran warga negaranya kemudian menjalankan struktur negara yang bersifat monopolistis.¹⁰

Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers, merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah atau konstitusi untuk melindungi bahkan membebaskan media untuk menyebarluaskan, mencetak, menerbitkan surat kabar, beropini, berpendapat, bahkan berkompetisi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, atau institusi. Kebebasan pers juga merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi, yang terdapat di dalam pilar ke-4. Negara Demokrasi seharusnya dapat menjamin hak-hak individu terutama hak untuk berekspresi.¹¹ Sayangnya, Afrika Selatan dan Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi tidak merasakan kebebasan tersebut. Kebebasan Pers di Afrika Selatan dan di Indonesia justru terhambat, terlebih lagi Kebebasan Persnya terkekang. Afrika Selatan dan Indonesia mengalami masa-masa sulit untuk memperjuangkan Kebebasan Pers di negaranya. Kala itu pemerintah bahkan institusi justru menunggangi Pers atau Media sebagai alat perpolitikannya. Sehingga Afrika Selatan dan Indonesia berusaha untuk keluar dari kebijakan-kebijakan otoriter tersebut agar dapat memperjuangkan kebebasan pers. Indonesia dan Afrika Selatan walaupun sebuah negara demokrasi, tetapi sistem persnya merupakan sistem pers otoriter dilihat dari kebijakan yang dibuat.

¹⁰ Siregar, Ashadi. "*Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni.*" Vol4, No 2, November, 2000. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11119/8360>

¹¹ Nasution, Latipoh. "*Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital.*" Vol4, No 3. 2020.

1.2.1 PEMBATASAN MASALAH

Di dalam penelitian ini penulis membatasi masalah berdasarkan studi kasus yang dipilih, kurun waktu dan aktor yang terlibat. Fokus dari studi kasus yang dipilih adalah perjuangan Afrika Selatan pada masa Apartheid sampai berakhirnya Apartheid (1994-1999) dimana konstitusi Afrika Selatan dapat mengutarakan dengan jelas bahwa setiap orang atau kelompok berhak atas kebebasan berpendapat, begitu pula media yang berhak untuk menerima dan berbagi ide maupun informasi. Untuk dapat dianalisis menggunakan metode komparatif, studi kasus yang akan juga dianalisis yaitu pada Masa Orde Baru hingga orde Reformasi di Indonesia (1998-1999) dimana Indonesia harus melewati masa kelam yang menghambat kebebasan pers sebagai pilar Negara Demokrasi, sampai akhirnya Indonesia dapat mengesahkan Undang-Undang terkait kebebasan pers. Untuk upaya yang dilakukan pemerintah, penulis menjelaskan implementasi kebijakan bahkan keikut-sertaan pemerintah dalam memperjuangkan kebebasan pers.

Selain itu, aktor yang terlibat dalam studi kasus dalam penelitian ini adalah Afrika Selatan dan Indonesia pada masa Apartheid dan pada masa Orde baru sampai kepada pasca Apartheid dan Reformasi, yang dijabat oleh Nelson Mandela Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan BJ Habibie Presiden ke-3 di Indonesia yang hanya menjabat satu tahun.

1.2.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis, yaitu “Bagaimana upaya pemerintah Afrika Selatan dan Indonesia dalam memperjuangkan hadirnya Kebebasan Pers?”

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Afrika Selatan dan Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan pers. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya atau kebijakan yang dibuat serta hambatan yang terjadi terhadap kebebasan pers akibat upaya yang dilakukan pemerintah baik di Afrika Selatan, maupun di Indonesia.

1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait upaya pemerintah yang dilakukan terhadap kebebasan pers yang terjadi di Afrika Selatan dan di Indonesia, juga besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memiliki nilai guna, yaitu menjadi referensi untuk penelitian-penelitian lainnya mengenai kebebasan pers.

1.4 KAJIAN LITERATUR

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu dampak globalisasi. Artikel Jurnal dengan judul *The Impact of Globalization on Africa*, karya Alhaji Ahmadu Ibrahim membahas mengenai bagaimana globalisasi berdampak terhadap kebebasan berekspresi suatu negara, terutama di Afrika. Globalisasi sebagian besar didorong oleh kepentingan dan kebutuhan negara maju. Globalisasi sangatlah penting, karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga berdampak serta dapat mendorong agenda dari suatu negara. Di Afrika sendiri, sistem pemerintahan sudah sangat dilemahkan oleh kenyataan bahwa hadirnya

globalisasi menyebabkan terjadinya pembedaan ras untuk pembangunan ekonomi secara umum, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan kebangkitan politik dan sosial. Globalisasi juga berdampak negatif pada pengembangan dan konsolidasi demokrasi pemerintahan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengendalikan peristiwa yang sedang terjadi, juga pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat yang jauh dari demokratis. Namun diharapkan bahwa adanya Globalisasi di Afrika dapat menata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Tidak hanya itu, Globalisasi dapat membuka kehidupan orang kulit hitam ke budaya lain, aliran, nilai serta ide-ide yang lebih inovatif. Satu dampak positif utama dari globalisasi di Afrika, globalisasi menyediakan informasi tentang negara lain, kebebasan, serta terbukanya hak-hak untuk berekspresi.¹²

Literatur yang kedua karya Wj Van Vollenhoven dengan judul *The Right Freedom of Expression: The Mother of Our Democracy*, yang menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi menjadi hak dalam demokrasi. Salah satunya, kebebasan berekspresi membantu individu untuk mencapai pemenuhan diri. Kemampuan untuk mengekspresikan diri merupakan kegiatan makhluk sosial yang penting. Sachs mengatakan bahwa hak untuk mengekspresikan pendapat memungkinkan individu untuk menjadi seseorang. Kebebasan berekspresi juga dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan politiknya dan karena itu, mereka perlu memiliki akses ke informasi dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kebebasan berekspresi

¹² Ahmadu Ibrahim, Alhaji. "The Impact of Globalization on Africa." *International Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol.3 No.15; August 2013.

memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan demokrasi atau hak-hak dasar. Alston berpendapat bahwa proses demokrasi sebagai ranah politik tidak akan pernah bisa demokratis tanpa keterbukaan untuk mendengarkan semuanya, dan memungkinkan pandangan yang berbeda untuk diungkapkan. Banyaknya pandangan yang berbeda dan diterima secara sosial dapat menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Dalam mempertahankan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat, kebebasan berekspresi menjadi jembatan untuk mencegah terjadinya masyarakat yang stagnan. Hak atas kebebasan berekspresi diakui oleh pengadilan Afrika Selatan bahkan sebelum menjadi negara demokrasi.¹³

Selanjutnya merupakan artikel jurnal karya *Freedom of Expression Institute* dengan judul *Hate Speech and Freedom of Expression in South Africa*. Artikel jurnal ini mendukung bahwa kebebasan berekspresi ditetapkan sebagai kebebasan untuk berbagi, berkomunikasi, memberi dan menerima ide dan informasi yang diperlukan untuk mempertahankan negara demokratis yang sehat. Hak apa pun itu, hak harus dijaga, dilindungi dan dilakukan secara bertanggung jawab. Modul ini menjelaskan bagaimana Afrika Selatan dan *hate speech*. *Hate Speech* dideskripsikan sebagai pidato yang menampilkan hasutan kekerasan atau tindakan prasangka terhadap individu atau kelompok yang dilindungi, atau mungkin karena meremehkan atau mengintimidasi. Dalam kebebasan berekspresi, hak dasarnya tidak untuk memperluas kebencian, atau diskriminasi suatu individu atau kelompok. Afrika Selatan terus mengembangkan undang-undang untuk mengatasi

¹³ WJ van Vollenhoven. "The Right to Freedom of Expression: The Mother of Our Democracy". 2015. Volume 18. No 6.

hate speech, dalam memajukan kebebasan berekspresi artinya memungkinkan warga negara untuk sepenuhnya menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi tanpa melanggar hak-hak orang lain atau melanggar hukum.¹⁴

Melihat kepribadian Nelson Mandela dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, artikel jurnal ini menjadi salah satu literatur yang berisikan opini dari penulis dan mendukung penelitian saya. Judulnya adalah *The relevance and legacy of Nelson Mandela in the twenty-first century Africa: An historical and theological perspective*, karya Godson S. Maanga. Kita dapat belajar dari seorang model yaitu Nelson Mandela yang cerdas dalam bidang politik dan ekonomi, dan menentang kelompok apartheid. Selama hidupnya Nelson banyak mengorbankan waktunya untuk memperjuangkan orang-orang kulit hitam, beliau menjadi seorang negarawan yang dapat diandalkan. Hak berekspresi bagi orang-orang berkulit hitam sangat sulit didapatkan terutama ketika ingin memberikan opini, mengeluarkan pendapat. Tidak hanya itu, demokrasi semakin diperketat, perselisihan, ketidaksepahaman, bahkan di Afrika Selatan sendiri banyak dari jurnalis-jurnalis tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa jurnalis cenderung untuk melakukan dengan keberaniannya, namun berakhir dengan kehilangan nyawa mereka. Contohnya, Ken Saro-Wiwa yang meninggal karena dibunuh. Nelson Mandela juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi integritas moralnya agar dapat menjadi panutan. Melalui *African National*

¹⁴ "Hate Speech and Freedom of Expression in South Africa." 2017. Freedom of Expression Institute Module Series. RAITH Foundation.

Congress, Nelson Mandela terus melawan rasialisme, menuntut persamaan hak, dan menyingkirkan faksi etnis di Afrika Selatan.¹⁵

Dari keempat literatur di atas penulis mengkaji bahwa adanya kesamaan terhadap pandangan bahwa Globalisasi hadir dengan membawa banyak pengaruh terutama kebebasan untuk berekspresi dalam suatu negara. Keempat literatur di atas juga menjelaskan bagaimana seharusnya hak-hak untuk berekspresi digunakan dalam negara demokrasi. Berkaitan dengan kebebasan Pers, salah satu literatur juga melengkapi penelitian penulis dengan membahas perjuangan seorang tokoh di Afrika Selatan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam berekspresi.

Selanjutnya, buku karya David T. Hill dengan judul *Pers di Masa Orde Baru*, menjelaskan dan menceritakan bagaimana kehidupan pers di Indonesia. Sama halnya seperti di Afrika Selatan, pada masa orde baru, Indonesia juga mengalami kekangan dalam mengekspresikan pendapatnya. Orde Baru menduduki relasi yang pelik dengan tangan-tangan pemerintah yang mengendalikan pers sehingga membawa pers pada konflik langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan surat kabar terbesar kedua di Asia Tenggara, dengan penjualan harian bergensi lebih dari lima ratus ribu, sehingga heran dan dipertanyakan ketika pers tidak memiliki haknya untuk menyuarakan kritikan. Meskipun demikian, perkiraan terhadap pertumbuhan

¹⁵ S. Maanga, Godson. "The relevance and legacy of Nelson Mandela in the twenty-first century Africa: An historical and theological perspective." *African Journal of History and Culture*. Vol. 5(5), pp. 96-113, July, 2013.

dan perkembangan media cetak terus dipantau, bahkan industri pers Indonesia diperkirakan akan memperluas ke media lain, yaitu media elektronik.¹⁶

Artikel Jurnal karya Satrio Saptohadi, dengan judul *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*. Penulis beropini bahwa kehidupan pers di era Orde Baru menjadi dampak terhadap corak kultur di Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah fungsi kontrol sosialnya, dimana pers tidak dapat menyampaikan kritikan. Seharusnya kehadiran pers dapat memperkokoh masyarakat dan memperlihatkan transparansi pemerintahan. Berakhirnya masa jabatan Soeharto, yang digantikan oleh BJ. Habibie merupakan langkah konstitusional karena gerakan reformasi ini melahirkan peraturan-peraturan baru sebagai pengganti peraturan yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila, salah satunya yaitu Undang-undang untuk mengatur peran pers yang bebas, dan merdeka. Artikel Jurnal ini juga didukung dengan pengertian pers, pertumbuhan dan perkembangan pers di Indonesia, sistem pers dan ciri-ciri pers yang telah merdeka. Hal tersebut mendukung penelitian saya untuk menjelaskan lebih dalam mengenai pers yang terhambat di Afrika Selatan dan di Indonesia.¹⁷

Sebuah artikel jurnal yang juga mendukung penelitian saya, karya Andi Suwirta dengan judul *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional*. Artikel Jurnal ini berisikan hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat yang merupakan sebuah

¹⁶ Hill, David T. "The Press in New Order Indonesia." First Edition. University of Western Australia Press, 1994.

¹⁷ Saptohadi, Satrio. "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*. 2001. <https://pdfs.semanticscholar.org/b1c9/661b349294ff4d54fd223532412c4688ba6a.pdf>

kerangka dinamis dan ideal. Namun, kenyataannya hubungan antara pers dan pemerintahan hanya untuk menguntungkan kepentingan dan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Interaksi antara pers dan pemerintah juga turut menentukan corak kehidupan pers di Indonesia. Penulis memberikan opini bahwa Indonesia sangat didukung kebebasan persnya, selama mereka mengambil kebijakan politik, sosial dan ekonomi yang menguntungkan publik, mendorong kehidupan yang demokratis dan mengharumkan nama bangsa. Namun dukungan tersebut bukan berarti tanpa kritik dan tidak sebebaskan yang dipikirkan. Kebebasan pers pasang surut mulai dirasakan, pers menjadi alat kepentingan bagi para penguasa, mulai terjadi pencabutan penerbitan surat kabar, dan masih banyak lagi. Sehingga, menjadi pertanyaan dimana peran masyarakat, pers dan pemerintah sebagai corak kultur pers Indonesia.¹⁸

Yang terakhir, sebuah artikel jurnal karya Herdi Sahrasad dengan judul *Pers, Demokrasi dan Negara Indonesia Pasca-Soeharto: Sebuah Perspektif*. Artikel jurnal yang mendukung penelitian saya karena didalamnya terdapat proses-proses berpindahannya kehidupan pada masa orde baru ke masa reformasi yang dimana sangat menekankan pada keempat pilar demokrasinya. Didalamnya juga menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara pers, dan negara dalam mengatur hak-hak berekspresi dan membuka ruang aspirasi untuk para jurnalis dalam menyampaikan opininya baik dalam surat kabar, maupun media yang ada.

¹⁸ Suwirta, A. "*Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional*." *SOSIOHUMANIKA*, 1(2) 2008. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196210091990011-SUWIRTA/1.artikel.suwirta.sosiohumanika.november.2008.ok.pdf

Kondisi pasca orde baru ini membutuhkan pers yang kuat untuk mewujudkan tujuan demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan keamanan. Perlunya jaminan untuk pers bebas, tidak dikenakan sensor atau larangan penyiaran, juga pers nasional berhak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Sehingga artikel jurnal ini akan menyajikan Undang-Undang yang terbentuk dari berpindahannya kedudukan Soeharto ke presiden-presiden Indonesia selanjutnya terhadap kebebasan pers dengan tujuan mewujudkan demokrasi.¹⁹

Sehingga, dari keempat literatur tentang kehidupan pers di Indonesia dapat disimpulkan bahwa keempat literatur tersebut memiliki kesamaan yang menjelaskan dan saling melengkapi dalam mendukung penelitian saya. Keempat literatur tersebut menjelaskan bagaimana proses dan kepentingan-kepentingan pemerintah dalam mengatur pers di Indonesia, dan juga proses berpindahannya dari satu periode ke periode yang lain. Berkaitan dengan kebebasan pers yang terjadi di Indonesia, salah satu literatur diatas juga menyajikan informasi mengenai surat-surat kabar yang dibredel kala itu, juga peran pers dibawah kepentingan pemerintah sehingga menghasilkan Undang-undang pada masa kepresidenan Soeharto dan Undang-undang baru yang lahir pada masa kepresidenan BJ. Habibie.

1.5 KERANGKA TEORI

Samuel P. Huntington seorang ilmuwan politik yang berasal dari Amerika Serikat, merupakan salah satu ilmuwan politik yang menjelaskan teori demokrasi karena hadirnya gelombang demokratisasi yang dialami oleh tiga puluh negara di

¹⁹ Sahrasad, Herdi. "Pers, Demokrasi dan Negara Indonesia POst-Soeharto: Sebuah Perspektif." Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2014. <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I12014.27-43>.

dunia yang melintasi Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur dan juga Eropa Timur. Di dalam bukunya yang berjudul "*The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*" Samuel P. Huntington menjelaskan tiga gelombang demokratisasi. Gelombang demokratisasi pertama yaitu adanya Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, sampai pada kemunculan fasisme di Italia. Gelombang demokratisasi kedua yaitu ditandai dengan berlangsungnya Perang Dunia II dan munculnya negara-negara baru. Sedangkan gelombang demokratisasi ketiga memungkinkan adanya kecenderungan politik dalam dunia modern. Di dalam bukunya juga Samuel P. Huntington menganalisis sebab akibat dari revolusi demokrasi dan mengevaluasi prospek demokrasi serta kestabilan negara-negara demokrasi. Buku ini sangat mendukung penelitian saya karena buku ini dibatasi untuk sekelompok peristiwa yang terjadi pada tahun 1970-1980an yang dapat saya gunakan untuk mendukung konsep demokrasi negara yang terdapat dalam penelitian saya. Menurut Samuel P. Huntington demokrasi sendiri merupakan sesuatu yang baik. Demokrasi memiliki konsekuensi positif bagi kebebasan individu dan stabilitas dalam negara.

Konsep Psikologi Politik dalam ilmu Hubungan Internasional mengalami transformasi yang mencerminkan bahwa terjadinya perubahan yang sangat luas ke Hubungan Internasional itu sendiri. Di dalam artikel jurnal karya Joshua D. Kertzer dan Dustin Tingley, dengan judul *Political Psychology in International Relations: Beyond the Paradigms* menjelaskan bahwa penelitian psikologis di dalam Hubungan Internasional telah berkembang, pada umumnya ilmuwan sosial akan mulai melakukan analisis terhadap hubungan antara psikologi dan rasionalitas.

Dengan menggunakan psikologi politik kita dapat mengetahui secara mendalam mengenai nilai dari model terhadap pemikiran rasional yang dapat dilihat dengan jelas secara deskriptif walaupun tidak akurat. Di dalam artikel jurnal ini terdapat enam perkembangan mengenai konsep Psikologi Politik di dalam berbagai bidang. Salah satu diantara perkembangannya sangat membantu, mendukung penelitian saya untuk menganalisis psikologi politik pemimpin negara Afrika Selatan dan Indonesia pada kala itu. Yaitu, pendekatan untuk melalui genetik, biologis dan evolusioner, konsep ini mengacu pada genetika perilaku, mempelajari asal-usul agresi dan juga menilai pengambilan keputusan yang dilakukan pelaku. Hal tersebut sangat membantu penelitian saya untuk menganalisis perilaku terhadap kebijakan yang diambil.

Di dalam buku Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia, di jelaskan bagaimana peran pers, kebebasan pers, tanggung jawab pers, dan etika dalam ber jurnalis me. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Pers. Kemerdekaan atau freedom akan senantiasa berisi kebebasan. Kemerdekaan pers adalah kebebasan pers. Wujudnya adalah kebebasan berkomunikasi, kebebasan berpendapat, dan menyebarkan pendapat. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kemerdekaan berekspresi. Dalam penelitian ini, Afrika Selatan dan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang sulit mendapatkan kebebasan berekspresi tersebut. Menurut Locke, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang memungkinkan suasana damai itu penuh dengan potensi keributan karena akan menimbulkan perselisihan. Dalam kondisi tersebut setiap orang akan berusaha mempertahankan kepentingannya.

Penelitian ini akan menggunakan teori komparatif politik sebagai pisau analisisnya. Di dalam buku karya Arend Lijphart yang berjudul *Comparative Politics and the Comparative Methods* dijelaskan bahwa Lijphart menguraikan empat metode, salah satunya metode komparatif. Salah satu unsur dari metode komparatif ini adalah dengan melakukan perbandingan antara negara secara sistematis, dengan menentukan perbedaan atau kemiripan di antara negara-negara. Di dalam metode komparatif ini, terdapat dua metode yang digunakan untuk menganalisis. Metodenya dikenal dengan nama Metode Mill, dengan dua kategori turunan. *Most Similar Systems Design*, dimana metode ini melakukan analisis dengan membandingkan kasus-kasus yang mirip dengan perbedaan variabel dependennya, dan dengan asumsi bahwa analisis ini dapat menemukan variabel independen yang membantu menjelaskan ada atau tidaknya variabel dependen lainnya. Metode analisis lainnya adalah *Most Different Systems Design*, yang berarti metode ini membandingkan kasus-kasus yang sangat berbeda, yang memiliki kesamaan hanya dengan variabel dependen, sehingga keadaan atau studi kasus apapun dianggap sebagai variabel independen. Kelemahan dari metode komparatif ini adalah para peneliti akan sulit menemukan kasus yang cukup serupa untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin terjadi dan juga, kasus yang ditemukan akan menghasilkan hipotesis sebelumnya.

Maka dari itu, sebuah karya klasik dalam bidang teori pers yang mendukung penelitian ini yaitu *Four Theories of the Press*, karangan Siebert, Peterson dan Schramm 1956 menciptakan paradigma dominan dalam menganalisis sistem-sistem media di dunia, khususnya dalam menilai tingkat kebebasan pers di berbagai

negara dan wilayah dunia. Walaupun kemudian muncul teori-teori pers yang lebih baru, seperti jurnalisme pembangunan, media revolusioner dan media demokratik-partisipan, tetapi teori-teori itu hanya merupakan pelengkap dari empat teori dasar yang sudah mapan sebelumnya.

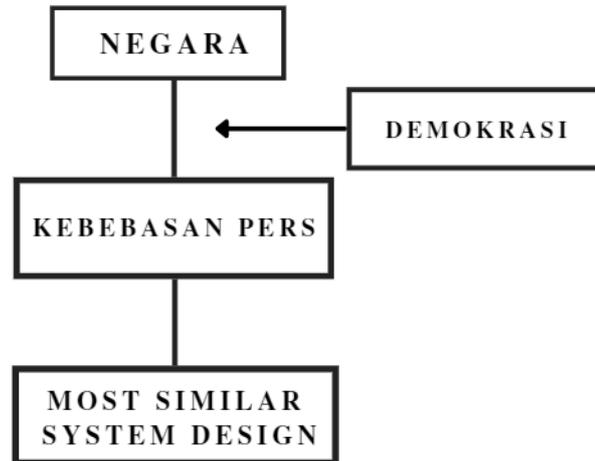
Sistem otoriter mengatur media untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah demi pencapaian tujuannya. Masalah yang paling utama dalam sistem ini adalah membuat serta melaksanakan pengawasan efektif terhadap media, terutama yang dimiliki swasta. Mekanisme kontrol yang dijalankan antara lain sistem perizinan, sensor oleh pemerintah, pajak khusus, undang-undang dan peraturan, yang tujuannya untuk mempertahankan bangsa dan negara dari pengkhianatan dan makar. Menurut Siebert et al, penganut sistem otoriter tidak mempersoalkan atau menolak diskusi tentang sistem politik secara filsafah umum, namun tidak memperbolehkan kritik langsung terhadap pemimpin-pemimpin politik yang sedang berkuasa, maupun kebijaksanaan dan proyek pemerintahan yang dilaksanakannya, apalagi upaya-upaya terbuka untuk menggulingkan kekuasaan. Konsep pers Otoriter didasarkan pada sejarah dan falsafah abad 16 dan 17 di Inggris tentang kekuasaan absolut kerajaan.

3 teori lainnya seperti, teori Libertarian yang berpandangan bahwa orang adalah makhluk yang rasional dan memiliki tujuan hidupnya sendiri. Kebahagiaan dan kesejahteraan individu merupakan tujuan dari masyarakat. Lalu, Teori Tanggung Jawab Sosial merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori Libertarian dan pertama kali dicetuskan pada abad-20 di Amerika Serikat oleh Komisi Kebebasan Pers, yang menekankan pada tanggung jawab sosial pers di

samping kebebasan yang dimilikinya. Di samping fungsinya untuk memberikan informasi, menghibur dan menjual, pers berkewajiban juga untuk “mengangkat konflik ke ranah diskusi”. Kontrol terhadap pers kebanyakan dalam bentuk pendapat publik, tindakan konsumen dan etika profesi. Perbedaan pokok antara teori Libertarian dan teori Tanggung Jawab Sosial adalah bahwa teori Tanggung Jawab Sosial menyarankan perlunya media dijaga oleh suatu lembaga agar bekerja secara bertanggung jawab, apabila mereka tidak melaksanakannya secara sukarela. Teori yang terakhir, Teori Komunis dimana peranan pers adalah untuk menginterpretasikan doktrin dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai. Media dalam masyarakat komunis dimiliki negara dan harus menjadi “propaganda kolektif, pengobar semangat kolektif dan penata kolektif”. Motif keuntungan dihilangkan dari kegiatan penerbitan dan penyiaran. Pemerintah memiliki suatu divisi khusus untuk penyensoran pers. Cara pengontrolan lain adalah penunjukan editor, arahan-arahan yang banyak tentang isi media, tajuk dan kritik media.

Keempat teori pers tradisional, dan metode komparatif di atas tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis bagi kajian tentang pers suatu negara, seperti Afrika dan Indonesia dalam penelitian ini. Metode komparatif di atas akan dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis kebebasan pers, di dukung dengan salah satu dari empat teori tradisional yang saya gunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, yaitu sistem otoriter. Di Dalam perjalanannya, pembagian keempat teori itu mendapatkan kritikan, bahkan ada yang menyarankan pendapat bahwa teori-teori dominan itu tidak dapat secara memuaskan mendeskripsikan realitas

media di berbagai negara. Alur kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui bagan dibawah ini:



Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa sebuah negara akan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kepemimpinannya, di bagan terdapat sistem pemerintahan demokrasi. Dimana, di dalam sistem pemerintahan demokrasi terdapat salah satu pilar atau ciri negara demokrasi, yaitu kebebasan pers atau berpendapat yang diaplikasikan dalam wujud wadah informasi untuk masyarakat luas. Afrika Selatan dan Indonesia merupakan dua negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dianalisis. Untuk menganalisis kebebasan pers di Afrika Selatan dan Indonesia, *most similar system design* merupakan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis dan mengumpulkan data. Dalam buku yang berjudul *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, mengatakan bahwa Metode

Kualitatif akan banyak mengumpulkan data untuk mendukung penelitiannya. Dalam mengerjakan penelitian ini, akan banyak mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan analisis yang bersifat narasi. Sesuai dengan buku Creswell pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi suatu fenomena, menggunakan teori dari adanya suatu fenomena sosial atau perilaku.²⁰ Dalam penelitian ini juga, penulis memilih studi kasus dua subjek, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. Penggunaan metode pemilihan studi kasus ini digunakan untuk memperdalam analisis dan menjawab rumusan penelitian. Dalam menggunakan metode studi kasus dua subjek, peneliti dapat mengkomparasikan kasus-kasus yang serupa yang merupakan variabel independen untuk menghasilkan hipotesis.²¹

1.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data-data yang relevan dengan jenis penelitian, seperti buku, jurnal, internet dan berita. Menggunakan juga beberapa kajian dokumen, berupa jurnal untuk mendukung permasalahan yang akan diteliti. Melalui Internet akan digunakan untuk mengakses sumber seperti berita, artikel, dan jurnal. Semua sumber akan dikaji menggunakan teknik triangulasi dengan tujuan mempermudah penelitian agar semakin dekat dengan data yang diinginkan.

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dibagi kedalam empat bagian pembahasan, yaitu;

²⁰ Creswell, John W. *“Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.”* Fourth Edition. SAGE Publications, (2014)

²¹ Roselle, Laura. Spray, Sharon. And T. Shelton, Joel. *“Research and Writing in International Relations.”* Third Edition. Routledge. 2020.

Bab I merupakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan serta akan dijabarkan juga mengenai teori dan konsep yang digunakan, pada bagian kerangka pemikiran. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan akan tertera di akhir bab.

Bab II akan terdapat dua sub-bab yang membahas mengenai Historis Kebebasan PERS di Afrika Selatan dan Indonesia didukung dengan dua sub-sub bab lainnya yaitu upaya pemerintahan dan juga prospek kebebasan pers Afrika Selatan dan Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan Pers.

Bab III akan berjudul “Analisis Studi Komparatif Kebebasan Pers Afrika Selatan dan Indonesia” yang merupakan Analisis menggunakan studi komparatif dengan metode *most similar system design*, didukung dengan tujuh sub-bab analisis pendukung di dalamnya.

Bab IV akan berisi kesimpulan dari penelitian ini sehingga dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas.